

## **Pengaruh Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Pekalongan**

Artini Fatikhathu Yaa Siinta<sup>1</sup>, Ardiyan Darutama<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: yaasintaa9@gmail.com<sup>1</sup>, ardiyan.darutama@uingusdur.ac.id<sup>2</sup>

**ABSTRAK** : Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh pengelolaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur yang sistematis. Sumber data penelitian ini berasal dari buku, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan Manajemen Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Temuan dalam kajian kajian literatur ini menyimpulkan bahwa Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi juga akan menambah nilai kualitas laporan keuangan dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga kegiatan utama dalam rantai nilai dapat dilakukan secara efektif dan efisien, Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa dihasilkan, Meningkatkan efisiensi, Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, Meningkatkan knowledge sharing, Meningkatkan efisiensi kerja di bagian keuangan. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Laporan Keuangan merupakan prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu sistem atau prosedur yang digunakan untuk membantu dalam proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat dan melaporkan transaksi ekonomi (keuangan) entitas pemerintah daerah yang digunakan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Secara khusus, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelapor atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya untuk memenuhi tujuan tersebut.

**Kata kunci:** Akuntansi Keuangan, Kualitas, Laporan Keuangan, efisiensi

**ABSTRACT** : The purpose of this study was to explain the influence of regional financial accounting system management on the quality of Pekalongan District financial reports. This study uses a systematic literature review method. The data sources for this research come from books, journals and other literature related to the Management of Regional Financial Accounting Systems on the Quality of Financial Statements. The findings in this literature review concluded that (CONCLUSION) Utilization of Accounting Information Systems will also add value to the quality of financial reports by providing accurate and timely information so that key activities in the value chain can be carried out effectively and efficiently, Improving quality and reducing product costs and services produced, Increasing efficiency, Increasing ability in decision making, Increasing knowledge sharing, Increasing work efficiency in the finance department. The Effect of the Implementation of the Regional Financial Accounting System on the Quality of the Regional Financial Accounting System Financial statements are procedures starting

*from the process of data collection, recording, summarizing, to financial reporting in the context of accountability for the implementation of the APBD which can be done manually or using a computer application. The application of a regional financial accounting system is a system or procedure used to assist in the process of identifying, measuring, recording and reporting economic (financial) transactions of local government entities that are used as information in the context of making economic decisions. In particular, the objective of government financial reports is to provide information useful for decision making and to demonstrate the reporting entity's accountability for the resources entrusted to it to fulfill those objectives.*

**Keywords:** *Financial Accounting, Quality, Financial Reports, efficiency*

## **1. PENDAHULUAN**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebuah bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal pelaksanaan perekonomian negara. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang handal.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan daerah antara lain pengaruh pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman dan pengelolaan keuangan daerah (Dewi et al., 2014).

Pengelolaan keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKPD harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih accountable dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kinerja keuangan, realisasi belanja modal, pengelolaan manajemen aset, serta dukungan sistem akuntansi yang ada (Nengsih, 2017).

Keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah menetapkan tujuan dan sasaran dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pengelolaan keuangan daerah perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi, dan keabsahan pembelajaaan dana (Defitri, 2018).

Pemahaman sistem akuntansi merupakan hal yang perlu dicermati, karena untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang memadai dalam bentuk pelaporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna, maka harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi dibidang penatausahaan keuangan daerah, serta harus memahami system akuntansi, khususnya akuntansi keuangan daerah. menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan sistem informasi akuntansi keuangan sangat tergantung pada komitmen dan keterlibatan pegawai pemerintah daerah. Pernyataan ini menandakan sistem akuntansi keuangan sebagai alat kontrol perlu dipahami oleh personel atau pegawai unit satuan kerja pemerintah daerah yang berkomitmen, artinya keterlibatan pegawai yang memiliki pemahaman di bidang

sistem akuntansi harus didukung oleh komitmen. Agar akuntansi dapat dijadikan salah satu alat dalam mengendalikan roda pemerintahan, akuntansi harus dipahami secara memadai oleh penyedia informasi keuangan.

Melihat pentingnya peranan dalam pengelolaan dan aturan yang jelas dalam penyusunan laporan keuangan daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian lain yang menginformasikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah yang dikelola sesuai dengan prosedur mulai dari proses pencatatan, pengiktisaran dan pengolnggan dengan melakukan posting jurnal ke dalam buku besar sesuai nomor perkiraan yang telah ditetapkan pemerintah sampai dengan laporan keuangan maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan tercapai. Sistem akuntansi keuangan daerah yang dikelola secara optimal dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, maka penelitian akan memperoleh petunjuk tentang cara kerja dan tata cara pemecahan masalah secara sistematis dari penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jenis metode pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. (Ahmad Suryana, 2017) mengemukakan bahwa metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit. Metode pendekatan studi kasus secara

deskriptif juga menjelaskan perbandingan antara teori, konsep, standar, atau arsip yang berlaku dengan praktek yang ada di dalam organisasi kemudian mengambil kesimpulan dan saran dari hasil perbandingan tersebut. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah (Silalahi & Ulber, 2009). Dari pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya. Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat benar-benar berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Definisi Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- Aset
- Kewajiban
- Ekuitas Dana
- Pendapatan
- Belanja
- Transfer
- Pembiayaan
- Arus Kas

Pembuatan laporan keuangan pemda dilakukan oleh PPKD dengan cara melakukan konsolidasi atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD-SKPD. Laporan keuangan pemda terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai anggaran dibandingkan dengan realisasinya. Informasi keuangan yang terkandung di dalamnya dikelompokkan menurut: (1) Pendapatan, (2) Belanja, (3) Penerimaan Pembiayaan dan (4) Pengeluaran Pembiayaan

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Informasi keuangan dalam neraca dikelompokkan kedalam (1) aset, (2) hutang dan (3) kekayaan bersih pemerintah (ekuitas dana).

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi arus kas masuk ke dan arus kas keluar dari Kas Negara/Daerah. Informasi arus kas dikelompokkan kedalam aktivitas yang menjadi penyebabnya, yaitu: (1) Aktivitas Operasi, (2) Aktivitas Investasi Non Keuangan, (3) Aktivitas Pembiayaan, (4) Aktivitas Non Anggaran.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan atau perincian atau analisis atas nilai suatu pos yang tersaji di dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas.

e. Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan keuangan pemerintahan seperti neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, sebagaimana telah dibahas di atas disusun dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar ini mengatur antara lain kapan aset, kewajiban, pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, pengeluaran penjualan dicatat dalam akuntansi dan selanjutnya dilaporkan di dalam laporan keuangan; bagaimana penentuan nilai dari masing masing

unsur laporan keuangan tersebut; bagaimana pengungkapannya agar pelaporan unsur-unsur laporan keuangan tersebut dapat diberi penjelasan secara memadai.

f. Sistem Akuntansi Pemerintahan

Untuk dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah (Pusat) maupun Pemerintah Daerah harus membangun Sistem Akuntansi Pemerintahan. Di dalam PP No. 24 tahun 2005 Pasal 1 ayat 4 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual atau terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. PP 24 tahun 2005 Pasal 6 ayat 1 mengatur bahwa Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sistem Akuntansi pemerintahan pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan di tingkat Pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah antara lain PP tentang SAP.

g. Sentralisasi dan Desentralisasi Akuntansi

Tentu dapat dibayangkan bahwa urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah tidak mungkin dilaksanakan oleh satu unit organisasi. Sebagai contoh, di dalam UU 32 tahun 2004 pasal 3 disebutkan bahwa Pemerintahan daerah meliputi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah daerah meliputi Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah terdiri dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yang dapat berbentuk sekretariat (sekretariat daerah dan sekretariat DPRD), dinas, badan dan kantor.

Setiap SKPD merupakan pengguna anggaran yang kemudian melakukan transaksi dan mengelola aset yang cukup besar nilainya. Di lihat dari aspek penanggung jawab akuntansi daerah dan cakupannya terdapat dua kemungkinan sistem yang diterapkan, yaitu sistem yang sentralisasi dan sistem yang desentralisasi. Jika digunakan sistem sentralisasi,

penanggungjawab akuntansi untuk seluruh transaksi keuangan diserahkan pada satu SKPD (biasanya adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan memperlakukan transaksi yang terjadi sebagai transaksi di tingkat pemda. Namun demikian, kepala SKPD, sebagai pengguna anggaran, tetap bertanggung jawab atas laporan keuangan dari satkernya masing-masing. Sedangkan dalam sistem desentralisasi, setiap SKPD menyelenggarakan akuntansi untuk mencatat transaksi yang terjadi di satkernya masing-masing hingga menghasilkan laporan keuangan untuk SKPD yang bersangkutan. Dalam hal ini satker selaku pengguna anggaran disebut entitas akuntansi. Selanjutnya, laporan keuangan dari seluruh SKPD disampaikan ke entitas pelaporan untuk digabungkan menjadi laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah. Satker yang bertindak sebagai entitas pelaporan umumnya adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (mungkin nama satker tersebut dapat berbeda diantara pemda yang satu dengan lainnya) (Margono, 2010).

## **2. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan**

Daerah Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan Akuntansi. Saat ini pemerintah telah memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan suatu sistem informasi, sebagai wadah untuk menyediakan informasi mengenai keuangan daerah yang dapat diakses, dikelola dan digunakan oleh berbagai pihak dan masyarakat luas. Penerapan sistem informasi di pemerintahan daerah merupakan suatu langkah penting untuk menciptakan good governance yang meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Konsep sistem informasi yang akan diterapkan adalah konsep sistem informasi terintegrasi yang akan didukung oleh jaringan komunikasi yang handal. Setiap sistem informasi yang ada diharapkan dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh masyarakat dan stakeholder pemerintah daerah

Kenyataan yang terjadi, rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh sistem informasi akuntansi keuangan yang belum diterapkan secara maksimal. Sehingga perlu adanya peningkatan dalam pengaplikasian sistem informasi keuangan daerah dalam penyusunan laporan keuangan



daerah. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara maksimal sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan. Suatu entitas akuntansi dalam pemerintah daerah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi akan sangat membantu untuk mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi (Pujiswara et al., 2014).

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi juga akan menambah nilai kualitas laporan keuangan dengan cara, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien, Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan, Meningkatkan efisiensi, Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, Meningkatkan sharing knowledge, Menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan (Yaqin & Jatmiko, 2018)

Dengan adanya fasilitas jaringan sistem informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai kepada laporan keuangan yang telah tersistem dengan menggunakan komputerisasi diharapkan akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya. Dengan demikian laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi informasi yang diharapkan dan mampu meningkatkan kualitas hasil dan tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu.

### **3. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sistem**

Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah seprosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Seiring dengan semakin kompleks transaksi keuangan daerah dan perubahan regulasi basis akuntansi, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pemanfaatan SAKD akan sangat membantu

mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasinya yaitu ketepatan waktu (Andelina & Hariyanto, 2017)

Penerapan Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu sistem atau prosedur yang digunakan untuk membantu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, rangkaian handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang diterapkan dengan baik, maka akan semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan. Karena pada dasarnya system akuntansi adalah suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ifa Ratifah dan Muhammad Ridwan (2012), Tutun Hermawanto (2013) serta penelitian Dewi Andini dan Yusrawati (2015) bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan dengan baik maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik pula. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis 1 (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Keputusan Kepala Badan Negara No. 46A Tahun 2003 ditentukan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap (perilaku) yang diperlukan

dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Kompetensi SDM merupakan karakteristik pengetahuan, keahlian, dan perilaku untuk melakukan suatu pekerjaan atau melakukan tugas dan fungsi secara efektif. Semakin kompeten SDM dalam pembuatan laporan keuangan, maka semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan. Karyawan yang memiliki kompetensi tinggi sangat berpengaruh dalam hasil pembuatan laporan keuangan, jika karyawan tersebut memiliki kompetensi yang tinggi maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah akan memenuhi karakteristik kualitatif. Kemampuan pada dasarnya mengacu pada keterampilan dalam mengkoordinasikan sumber daya dan menggunakannya secara produktif. Pada dasarnya, manajemen merupakan proses pemanfaatan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan menerapkan fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian (Du Brin et al, 1989). Untuk menerapkan akuntansi akrual double entry yang dibutuhkan SDM adalah pemahaman akuntansi yang baik. Pejabat pemerintah daerah yang menangani masalah keuangan tidak cukup hanya untuk menguasai administrasi anggaran, tapi juga harus memahami karakteristik transaksi yang terjadi dan Efek pada akun dalam laporan keuangan pemerintah. Kegagalan pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan kesalahan logika akuntansi akan berdampak pada keuangan. Pernyataan disiapkan dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada kasus ini, Pemerintah umumnya memiliki sejumlah sumber daya manusia yang terbatas serta menguasai logika akuntansi. Jumlah pembiayaan pemerintah daerah atas latar belakang non-akuntansi merupakan kendala utama saat ini. Selain itu Faktor manusia, ketidakkonsistenan pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah tersebut juga merupakan faktor utama bagi lambannya perkembangan keuangan regional.

Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan output yang dihasilkan oleh bidang ilmu akuntansi, sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan orang-orang yang berkompeten di bidang ilmu akuntansi. Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi memiliki kompetensi di bidang ilmu akuntansi, maka ia akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik, menggunakan

pengetahuan dan pemahamannya dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang ditetapkan. Selain itu, sumber daya manusia yang berpengalaman akan mampu bekerja dengan cepat, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan bisa tepat waktu.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Andini, 2015), (Hertati, 2015) bahwa Kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis 2 (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2 : Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

### **Komitmen Organisasi memoderasi hubungan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Teori kegunaan keputusan (decision-usefulness theory), informasi akuntansi menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual Financial Accounting Standard Boards (FASB), yaitu Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat. SFAC No.2 tentang Qualitatif Characteristics of Accounting Information menggambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya dan kualitas sekunder. PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah mengadopsi karakteristik kualitatif primer sebagaimana tercantum dalam SFAC No 2, hanya saja SAP menekankan pada empat prasyarat normatif, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Terciptanya pemerintahan yang bersih (good governance) meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah dengan didukung oleh komitmen organisasi yang tinggi mulai dari penganggaran sampai penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sebagai suatu bentuk terlaksananya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. komitmen organisasi yang tinggi berdampak pada keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sehingga dapat meningkatkan kualitas keandalan laporan keuangan pemerintah, Loyalitas pegawai yang tinggi pada suatu organisasi pekerjaan akan membawa dampak yang baik bagi suatu organisasi dalam pencapaian tujuan, serta

berpengaruh baik untuk memotivasi rekan kerja dalam organisasi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis 3 (H3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3 : Komitmen Organisasi memperkuat pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

### **Komitmen Organisasi memoderasi hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

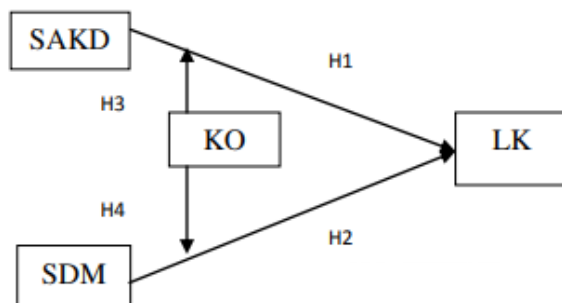
(Zeyn, 2011) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi. Komitmen organisasi yang tinggi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (sense of belonging) bagi pekerja terhadap organisasi. Komitmen dibutuhkan oleh organisasi agar sumber daya manusia yang kompeten dalam organisasi dapat terjaga dan terpelihara dengan baik. Hal ini disebabkan pegawai dengan komitmen organisasi yang tinggi akan mampu mencapai kinerja yang tinggi serta menunjukkan dedikasi dan dukungan yang kuat dalam pencapaian tujuan organisasi (Arnie, 2011). Penelitian yang dilakukan (Rahmawati, 2015) menunjukkan bahwa komitmen organisasi memoderasi atau memperkuat pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Komitmen organisasi dapat tercipta jika organisasi, terutama pimpinan memberi dorongan, respek, menghargai kontribusi dan memberi apresiasi bagi pegawai/staf dalam pekerjaannya. Di samping itu organisasi terutama pengambil kebijakan memiliki komitmen untuk mendukung perkembangan pegawainya yaitu dengan memberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, memajukan dan memberdayakan anggota organisasi serta mempromosikannya, sehingga pegawai tersebut akan meningkatkan komitmennya terhadap organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Papilaya (2016) menunjukkan bahwa komitmen organisasi memoderasi hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. SDM yang kompeten di bidangnya memiliki komitmen organisasi yang tinggi, maka dia akan merasa terikat dengan nilai-nilai organisasi yang ada, sehingga apa yang dilakukan selalu mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Dia akan bekerja dengan senang hati dan menggunakan segala pengetahuan, pengalaman dan pemahamannya tentang akuntansi untuk menyusun laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Secara parsial seorang karyawan dengan tingkat komitmen yang tinggi, akan mendukung kompetensi yang dimiliki dalam bidang pekerjaannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2015), (Septanrini & Papailaya, 2016) menyatakan bahwa komitmen organisasi memperkuat hubungan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis 4 (H4) yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4 : Komitmen Organisasi memperkuat pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

### Kerangka Pemikiran



## 4. KESIMPULAN

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi juga akan menambah nilai kualitas laporan keuangan dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga kegiatan utama dalam rantai nilai dapat dilakukan secara efektif dan efisien, Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa dihasilkan, Meningkatkan efisiensi, Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, Meningkatkan knowledge sharing, Meningkatkan efisiensi kerja di bagian keuangan. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Laporan Keuangan merupakan prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu sistem atau prosedur yang digunakan untuk membantu dalam proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat dan melaporkan transaksi ekonomi (keuangan) entitas pemerintah daerah yang digunakan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Secara khusus, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan

untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelapor atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya untuk memenuhi tujuan tersebut.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Agung, G., Dian, P., & Ekonomi, F. (2020). *Ni Gusti Putu Wirawati 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia*. 2102–2114.
- Ahmad Suryana. (2017). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 43. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)
- Andelina, M. W., & Hariyanto, A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Demak). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 8(2), 132–153. <http://jurnal.stietotalwin.ac.id/index.php/jimat/article/view/149>
- Andini, D. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. *Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 1, 65–82.
- Anwar, S. M., & Sumiati, S. (2016). PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Palopo). *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 1(2), 84–94. <https://doi.org/10.35906/jm001.v1i2.125>
- Arnie. (2011). *Pentingnya SDM Dalam Organisasi*.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376>
- Dewi, N. M. R. K., Sunarwati, K. K., & Darmawan, N. A. S. (2014). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesa*, 2.
- Hanafiah, R. R., Abdullah, S., & Saputra, M. (2016). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, kapasitas sumber daya manusia, dan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan daerah (studi di SKPK pemerintah Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi*, 5(4), 77–86.
- Haura, G. A., Junita, A., & Meutia, T. (2019). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN

- INTERNAL DAERAH , DAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH VARIABEL MODERASI ( Studi pada SKPK di Kota Langsa ). *Jurnal Penelitian Ekonomi ...*, 3, 33–52. <https://ejournalunsam.id/index.php/jensi/article/view/1873>
- Hertati, L. (2015). Competence of Human Resources, The Benefit of Information Technology on Value of Financial Reporting in Indonesia. Research. *Financi and Accounting*, 6.
- Margono. (2010). *Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Nengsih, E. S. D. A. N. (2017). 236681-*Analisis-Pengaruh-Kinerja-Kuangan-Realit-3D43375C*. 10(1), 48–67.
- Personal, B., Pendukung, D. A. N. P., & Arfan, M. (2017). *DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ( Studi pada Satuan Kerja Perangkat Aceh )*. 6(3), 74–79.
- Pujiswara, Bagus, I., & Nyoman Trisna Herawati, dan N. K. S. (2014). “Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. *Jurnal Akutansi*, 02.
- Rahmawati, D. (2015). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan KeuanganPemerintan Daerah dengan Komitmen Organisasi sebaga Pemodelasi (Studi Empiris pada Pemerintah Kab. Sragen)*. 13.
- Sa’adah, S., & Nasrullah, M. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. *Journal of Public Accounting (JPA)*, 1(1), 14–24. <https://doi.org/10.30591/jpa.v1i1.2614>
- Septanrini, D. F., & Papailaya, F. (2016). Interaksi Komitmen Organisasi terhadap Faktor – Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Ilmu Ekonomi Dan Sosial*, 7, 100–116.
- Sholikhah, R. N., Astuti, D. S. P., & Susnarko, M. R. (2016). Pengaruh Pegawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Kantor DPPKAD kabupaten Boyolali). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 12(April), 168–175. [https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/751/jbptunikompp-gdl-sansantrip-37523-1-unikom\\_s-l.pdf](https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/751/jbptunikompp-gdl-sansantrip-37523-1-unikom_s-l.pdf)
- Silalahi, & Ulber, A. G. (2009). *Metode penelitian sosial*.
- Yaqin, A., & Jatmiko, B. (2018). Kontribusi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah: Studi Kasus Pada Satuan Kerja



Perangkat Daerah Kab. Biak Numfor. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.18196/rab.020116>

Zeyn, E. (2011). Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Akuntansi Dan Keuangan*, 1, 21–37.